

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII: Yogyakarta, 2001.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansyah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2010.
- Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
- Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang layak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- M. Yusuf, *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Dearah Terbaik*, Salemba Empat, Tangerang, 2013.
- Philipus M. Hadjon, et. al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Reno Reynaldo, *Pengelolaan Gelanggang Olahraga H. Agus Salim Padang*, (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2015.
- Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

C. Website :

www.pesisirselatankab.go.id diakses pada tanggal 29 Januari 2017 Pukul 13.30 WIB.

